



FORBIL
INSTITUTE
BILLING FOR THE FUTURE, NOW

Community Relations **dalam ‘Santri Jogo Kali’:**

**Kolaborasi Pemerintah Daerah dan
Warga untuk Pelestarian Lingkungan**

Menis Agus Muttaqin | Tri Utami Rosemarwati

Community Relations dalam ‘Santri Jogo Kali’: Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Warga untuk Pelestarian Lingkungan

Penulis

Menis Agus Muttaqin
Tri Utami Rosemarwati

Editor

Tri Utami Rosemarwati

Desain Grafis

Tri Utami Rosemarwati

Diterbitkan oleh **Forbil Institute**
Hak Cipta dilindungi Undang-
Undang.

Dilarang memperbanyak atau
mengutip sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari
Forbil Institute.

Cetakan Pertama

Dicetak di Yogyakarta, Indonesia
ISBN 978-623-5455-03-7

Forbil Institute

Jl. Sunan Giri RT 01 / RW 25
Tambakan, Sinduharjo, Ngaglik,
Sleman, DI Yogyakarta 55581

Telp: +62 81578011199

Email: forbil.jogja@gmail.com



Kata Pengantar

Dalam memformulasikan solusi atas permasalahan lingkungan yang ada, perlu adanya kolaborasi dari berbagai sektor baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Pelibatan masyarakat dalam tata kelola lingkungan menjadi signifikan mengingat adanya keterbatasan gerak pemerintah dalam menuntaskan masalah lingkungan yang kian mengkhawatirkan. Strategi ini merupakan cara efektif yang tidak hanya mampu menumbuhkan kesadaran warga akan pelestarian lingkungan tetapi juga menciptakan kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat.

Melalui E-book berjudul **“Community Relations dalam ‘Santri Jogo Kali’: Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Warga untuk Pelestarian Lingkungan”** ini, penulis mencoba menunjukkan contoh sukses penerapan konsep hubungan pemerintah dan masyarakat ini untuk mengatasi masalah sampah di sungai-sungai yang ada di Kabupaten Jombang. Program Santri Jogo Kali yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup Jombang beserta masyarakat dan aktivis lingkungan ini bisa diadopsi oleh pemerintah daerah lainnya agar bersama dengan masyarakat dapat menyelesaikan persoalan lingkungan di daerah masing-masing.

Akhirnya, selamat membaca!

Dr. Nanang Pamuji Mugasejati
Direktur Forbil Institute

Executive Summary

- *Community Relations* adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial dari lembaga untuk berinteraksi dengan komunitas di sekitarnya melalui sebuah program yang terencana.
- *Community Relations* dapat diterapkan dalam institusi pemerintah ketika pemerintah menyadari keterbatasan geraknya dalam mengelola berbagai permasalahan yang ada sehingga perlu adanya keterlibatan masyarakat.
- Konsep *Government-Community Relations* telah lama diterapkan dalam tata kelola lingkungan di berbagai negara di dunia, seperti di Australia dan Republik Rakyat Tiongkok. Kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam implementasinya sehingga penting untuk mempelajarinya guna menemukan pendekatan yang tepat bagi permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia.
- Contoh penerapan konsep *Government-Community Relations* di Indonesia yang menggunakan pendekatan PR Baru yang menempatkan komunitas sebagai mitra lembaga dan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah, warga, dan bahkan pelaku bisnis.

Daftar Isi

- 4** *Executive Summary*
- 6** *Starting Point: Berkenalan dengan Konsep Corporate Social Responsibility*
- 7** Mengenal Konsep Community Relations
- Langkah-Langkah Menyusun Kegiatan *Community Relations* Berbasis CSR
 - Penerapan *Community Relations* dalam Institusi Pemerintah
- 14** *Government-Community Relations* dalam Pelestarian Lingkungan: *Best Practice* dari Berbagai Negara
- 17** Santri Jogo Kali: Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Warga Lokal dalam Melestarikan Lingkungan
- Lini Masa Berdirinya Santri Jogo Kali
 - Berangkat dari Kondisi Kali Gude
 - Program Santri Jogo Kali
 - Pelibatan Seluruh Elemen Masyarakat
 - Lebih dari Sekadar Bersih Sungai
 - *Lesson Learned* dari Santri Jogo Kali
 - Tantangan dan Kendala
 - *Policy Brief*
- 28** Profil Penulis
- 29** Daftar Pustaka

Starting Point: Berkenalan dengan Konsep Corporate Social Responsibility

Sebelum mengenal konsep *Community Relations*, penting untuk memahami terlebih dahulu apa itu *Corporate Social Responsibility* (CSR). Secara singkat, CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup yang diwujudkan melalui interaksi secara sukarela antara perusahaan dengan *stakeholder*.

Jika mengutip WBCSD (*World Business Council for Sustainable Development*) dalam Tresna Wiwitan dkk., setidaknya ada tiga pilar dasar CSR yakni:

**Mendorong
kesejahteraan
ekonomi**

**Perbaiki
lingkungan
hidup**

**Tanggung
jawab sosial**

CSR menempatkan perusahaan sebagai lembaga sosial yang berada di tengah masyarakat, maka dari itu perlu adanya upaya komunikasi yang mendekatkan kedua belah pihak untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Mengenal Konsep *Community Relations*

***Community relations* atau Hubungan Komunitas** adalah sekumpulan program atau kegiatan yang dilakukan perusahaan sebagai implementasi dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dengan kata lain, ***community relations* adalah salah satu bentuk CSR.**

- Pada dasarnya, *community relations* adalah kegiatan hubungan masyarakat atau *Public Relations* (PR) karena merupakan bentuk komunikasi lembaga dengan komunitas di sekitarnya.
- Komunitas di sini berarti **interaksi antar manusia** yang menjadi anggota suatu komunitas dan tidak selalu terikat dalam wilayah geografis tertentu.

2 Pendekatan dalam *Community Relations*

(Cutlip, Center & Broom, 2001: 462-468).

1

Konsep PR lama

Lembaga sebagai pemberi donasi kepada komunitas

2

Konsep PR baru

Komunitas sebagai mitra lembaga dan terdapat hubungan timbal balik

Langkah-Langkah Menyusun Kegiatan *Community Relations* Berbasis CSR

Menurut Tresna Wiwitan dkk., praktisi PR dapat menyusun kegiatan *community relations* yang berbasiskan tanggung jawab sosial melalui langkah-langkah berikut:





Penerapan *Community Relations* dalam Institusi Pemerintah

Tidak hanya di sektor bisnis, konsep *community relations* juga dapat diterapkan di sektor pemerintahan. Idealnya, *community relations* dapat membantu mempertemukan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dengan komunitas dalam rangka mencapai tujuan yang sama.

Tabel berikut menunjukkan **spektrum** atau **tingkat keterlibatan pemerintah dengan komunitas** serta bentuk partisipasinya. Semakin ke bawah menunjukkan semakin terlibatnya komunitas dan sebagai akibatnya, semakin terwujudnya demokrasi partisipatif.

Tindakan Pemerintah	Pengertian	Bentuk Partisipasi	Government Action	Representative democracy
Intuitive representation	Bentuk paling dasar dari partisipasi publik	Pemungutan suara dalam Pemilu	↓	↓
Informing Decision	Sosialisasi pemerintah kepada publik terkait kebijakan yang dibuat	Partisipasi pasif		
Consultation	Komunitas memberi feedback terkait isu spesifik. Pemerintah yang menentukan isu serta mengontrol keputusan akhir	Partisipasi tidak langsung (melalui konsultasi)		
Structured Community Involvement	Komunitas dilibatkan dalam perumusan kebijakan melalui proyek yang dimediasi panel representatif dari pemerintah	Partisipasi fungsional		
Community Partnership	Komunitas berpartisipasi secara setara dalam merumuskan kebijakan dengan pemerintah	Partisipasi Interaktif		
Facilitation of Community-led Development	Pemerintah memfasilitasi komunitas untuk secara mandiri merumuskan kebijakan, sumber daya, serta tindakan yang diperlukan	Mobilitas mandiri oleh komunitas		

Sumber: Dikutip dari Cavaye (1999), Pretty (1995), Arnstein (1969) dalam Cavaye (2022)

Mengapa *Community Relations* Penting bagi Pemerintah?

Menurut Cavaye (2022), *community relations* menjadi kian penting ketika pemerintah menyadari geraknya yang semakin terbatas dalam mengelola berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi antara upaya pemerintah dan komunitas untuk mencapai kepentingan bersama.

Selain itu, *community relations* dapat menjadi cara pemerintah untuk mendekatkan diri dengan publik. Hal ini berkat adanya *demand* publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Kesadaran publik untuk berpartisipasi ini dapat menjadi indikator dewasaanya sistem demokrasi di sebuah negara.

Bagaimana Pemerintah Seharusnya Memposisikan Diri dalam Hubungannya dengan Komunitas?

Pemerintah dapat menempatkan diri sebagai **fasilitator** dan bahkan **menawarkan kerja sama** untuk meningkatkan kapasitas dan nilai dari suatu komunitas. Dengan kata lain, pemerintah menjadi “*enabler*” dalam hubungannya dengan komunitas.

Kriteria Suksesnya Program *Community Relations*

Menyusun strategi program *community relations* merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Untuk menemukan formulasi yang tepat, pemerintah perlu melalui banyak diskusi dengan berbagai sektor di masyarakat serta *trial* dan *error* agar akhirnya dapat memecahkan masalah yang ada. Menurut Cavaye (2022), terdapat **10 kriteria program *community relations* dapat dikatakan berhasil**

- 1** Kegiatan *community relations* harus **sejalan dengan visi misi** yang diusung pemerintah
- 2** Adanya **standar dan prosedur** dalam pelaksanaan kegiatan *community relations*
- 3** Adanya **kolaborasi antar berbagai lembaga pemerintah** dalam pelaksanaan kegiatan
- 4** Adanya **hubungan yang berkelanjutan** antara komunitas dengan pemerintah
- 5** Pihak yang berwenang harus **terjun langsung** dan terlibat di lapangan
- 6** Pemerintah **memberi contoh melalui aksi nyata** dan tidak hanya melalui imbauan
- 7** **Meningkatnya kepercayaan** warga terhadap pemerintah
- 8** **Meningkatnya kualitas kepemimpinan** baik di dalam komunitas maupun pemerintah
- 9** Adanya **tindak lanjut dari pemerintah** setelah melakukan kegiatan *community relations*
- 10** **Kepentingan politik** di dalam komunitas maupun pemerintah harus dikelola dengan baik

Tantangan Pelaksanaan Program *Community Relations*



Pemerintah harus menjunjung tinggi **asas keberagaman** dalam membangun hubungan dengan komunitas yang plural. Di sisi lain, pemerintah juga harus tetap mengedepankan **asas keadilan** dalam pengambilan keputusan agar tidak dianggap menguntungkan satu pihak tertentu.



Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan **hasil yang konkrit** dengan **waktu dan sumber daya yang efisien**.



Hubungan komunitas memerlukan adanya **keberlanjutan interaksi** serta komitmen jangka panjang. Namun faktanya, terdapat aspek-aspek politis serta keuangan yang berpotensi mempersingkat hubungan yang telah dibangun.



Partisipasi warga yang masih jauh dari harapan membuat pemerintah harus memutar otak untuk menemukan **strategi menggaet komunitas secara lebih luas**.



Adanya **information gap** antara komunitas dengan pemerintah terkait kultur dan budaya setempat. Program yang dicanangkan pemerintah harus tetap mempertimbangkan aturan-aturan serta kearifan lokal yang ada.

Government-Community Relations dalam Pelestarian Lingkungan: *Best Practice* dari Berbagai Negara

Konsep *Government-Community Relations* telah diadopsi berbagai negara di dunia untuk membantu memecahkan masalah lingkungan. Beberapa negara yang sudah menerapkan konsep ini antara lain Australia dan Republik Rakyat Tiongkok. Kedua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam implementasi programnya.

Australia dengan *The National Landcare Program* menjadi bukti bahwa partisipasi komunitas memiliki potensi untuk menggabungkan dukungan pemerintah dengan inisiatif komunitas. Lebih lanjut, program ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta merumuskan strategi-strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan yang ada.

Di sisi lain, Tiongkok cenderung membatasi keterlibatan masyarakat dalam tata kelola lingkungan. Namun menariknya, **komunitas *Green Zhejiang*** hadir dengan aktif melakukan advokasi masalah lingkungan agar menjadi perhatian utama pemerintah setempat.

Jika dilihat dari spektrum keterlibatan pemerintah dan komunitas oleh Cavaye (1999), ***The National Landcare Program* telah menyentuh level *Community Partnership*** dimana terdapat partisipasi interaktif dan setara antara pemerintah dan komunitas dalam hal perumusan kebijakan. Sebaliknya, ***Green Zhejiang* berhenti di tahap *Consultation*** dimana komunitas hanya berfungsi sebagai konsultan yang memberi informasi terkait isu lingkungan. Pemerintah masih memegang kendali penuh terhadap langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi isu spesifik tersebut.

Penerapan konsep *Government-Community Relations* dari kedua negara ini akan dibahas lebih mendetail pada halaman selanjutnya. Kedua contoh ini menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia untuk melihat strategi yang dapat diadaptasi serta disesuaikan dengan kondisi lingkungan di Indonesia.

Australia

The National Landcare Program

Konsep *government-community relations* bukanlah hal baru di Australia. Negara ini telah lama dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi partisipasi komunitas melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat sukarela (*volunteer*). Salah satu program Pemerintah Australia dalam melestarikan lingkungan adalah dengan membentuk Gerakan Perlindungan Lahan atau *The National Landcare Program*.

Latar Belakang Program

Adanya aktivitas pembabatan lahan yang mengakibatkan masalah seperti kekeringan, erosi, dan menurunnya kualitas air di daerah-daerah pedesaan Australia.

Tujuan

Mewujudkan lahan pertanian yang berkelanjutan serta meningkatkan keragaman hayati melalui partisipasi masyarakat desa.

Bentuk Kerjasama

Warga lokal menjadi "mitra" pemerintah dengan bergabung di komunitas-komunitas Perlindungan Lahan secara sukarela.

Bentuk Kegiatan

- Menanam pohon
- Membangun struktur untuk mengatasi erosi
- Membasmi hama dan gulma

Sumber Dana

Didanai oleh pemerintah Australia melalui *Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water*

The National Landcare Program berhasil menjadi contoh sukses bahwa partisipasi komunitas dapat berjalan efektif ketika didukung oleh pemerintah. Program ini berhasil memobilisasi berbagai sektor di masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi warga lokal maupun pemilik lahan mengenai isu-isu lingkungan serta strategi untuk menanggulangi masalah yang ada.

Republik Rakyat Tiongkok

Green Zhejiang

Tiongkok dikenal dengan model kebijakan publik yang eksklusif sehingga tidak membuka ruang bagi pihak lain untuk turut andil dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu, partisipasi publik hanya dapat dilakukan secara informal seperti yang dilakukan oleh organisasi sosial independen bernama **Green Zhejiang**.

Latar Belakang Program

Adanya penurunan kualitas air sebagai dampak dari pesatnya industrialisasi di Zhejiang. Kondisi ini mengakibatkan masalah kesehatan pada masyarakat.

Tujuan

Meningkatkan kualitas air di Zhejiang

Bentuk Kerjasama

- Berperan sebagai konsultan saat pemerintah menyusun kebijakan lingkungan
- Berperan sebagai informan yang mengidentifikasi pihak-pihak yang melanggar peraturan

Bentuk Kegiatan

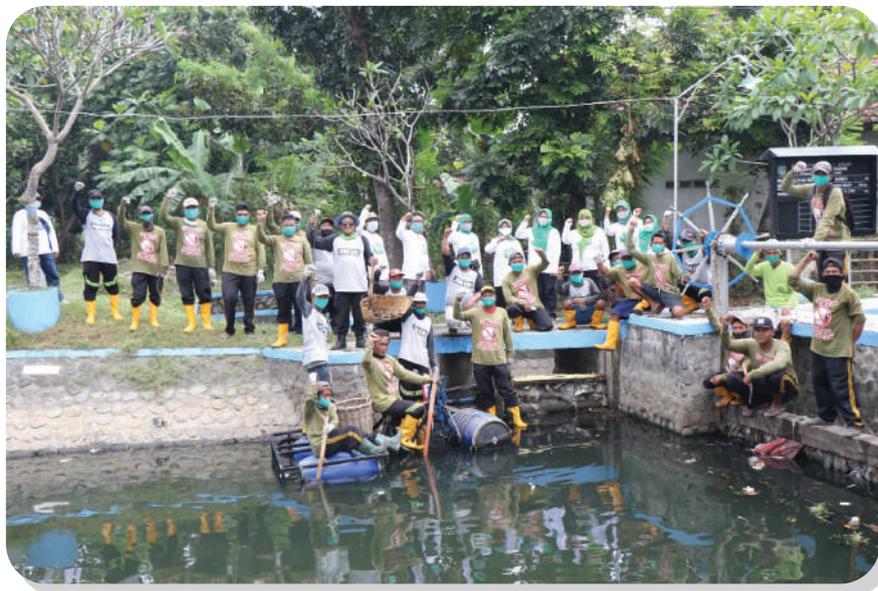
- Memobilisasi masyarakat untuk melaporkan kasus polusi air melalui media lokal
- Menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendorong implementasi kebijakan lingkungan yang lebih efisien
- Menyelenggarakan diskusi terbuka dengan *stakeholder*

Sumber Dana

Donasi dari pihak ketiga, misalnya dengan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan untuk perusahaan-perusahaan besar.

Kegiatan Green Zhejiang terbukti sukses sebab kualitas air di Zhejiang semakin meningkat (Gao & Teets, 2021). Kendati demikian, kontribusi Green Zhejiang dikhawatirkan tidak akan berlangsung lama sebab tidak terlembaganya organisasi serta tidak adanya otoritas formal yang memungkinkan organisasi ini untuk campur tangan lebih jauh dalam tata kelola lingkungan di Tiongkok.

Santri Jogo Kali: Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Warga Lokal dalam Melestarikan Lingkungan



Sumber foto: Dokumentasi DLH Jombang

Berdiri pada 22 Oktober 2015, **Santri Jogo Kali merupakan komunitas yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan sungai di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.** Sejak 2019, Santri Jogo Kali diadopsi menjadi program Dinas Lingkungan Hidup Jombang sebagai wujud dari kolaborasi antara pemerintah dengan warga lokal dalam pelestarian lingkungan.

Lini Masa Berdirinya Santri Jogo Kali

Adanya keluhan dari berbagai pihak yang diterima Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Jombang atas pencemaran di Kali Gude.



DLH menindaklanjuti dengan mengadakan **Focus Group Discussion** dengan aktivis lingkungan dan masyarakat setempat.

Tahun 2015, mulai digagas **kegiatan bersih sungai secara berkala** dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai.



Di tahun yang sama, terdapat **momentum penetapan Hari Santri Nasional** sehingga memunculkan ide nama kegiatan ini menjadi Santri Jogo Kali

Nama Santri Jogo Kali **tidak bermakna inklusif untuk kelompok santri**, tetapi sesuai dengan ikon Jombang sebagai Kota Santri. Kegiatannya pun terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.



Dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, tahun 2019 Santri Jogo Kali resmi menjadi lembaga **di bawah tanggung jawab DLH**.

Hingga kini, Santri Jogo Kali tidak hanya rutin melakukan kegiatan bersih kali tetapi juga melakukan **advokasi masyarakat** untuk menyadari pentingnya menjaga kebersihan sungai.





Sumber foto: Dokumentasi DLH Jombang

Berangkat dari Kondisi Kali Gude

Pencemaran di Kali Gude yang menjadi arteri Kab. Jombang semakin mengkhawatirkan. Kondisi sungai yang penuh dengan sampah menyebabkan sungai menghitam serta mengeluarkan bau tidak sedap. Pemerintah telah mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dari berbagai sektor namun belum kunjung menemukan solusi yang tepat.

Setelah menerima banyak keluhan dari masyarakat maupun aktivis lingkungan, DLH Jombang memutuskan untuk menyelenggarakan diskusi dengan pihak-pihak tersebut guna menemukan solusinya. Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dianggap menjadi formulasi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sejak tahun 2015, kegiatan bersih sungai secara berkala mulai dilakukan oleh komunitas ini bekerja sama dengan DLH Jombang.

Struktur Keanggotaan Santri Jogo Kali



**30 Orang
Pengurus Harian**

**Melakukan
aktivitas rutin**



**Anggota
Masyarakat**

**Mengikuti
kegiatan insidental**

Program Santri Jogo Kali

Kegiatan utama Santri Jogo Kali adalah membersihkan sungai-sungai di Kab. Jombang. Saat ini, sudah ada sekitar 10 sungai yang menjadi target kegiatan. Terdapat dua kategori sungai yang menjadi objek pembersihan yakni:



Kategori Rutin

Dilakukan di sungai-sungai dengan kondisi parah sehingga harus dilakukan pembersihan secara rutin. Contohnya Kali Gude dan Kali Jombang Wetan yang ditarget bersih total dan tidak ada pembuangan sampah dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan.



Kategori Insidental

Biasanya dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi lainnya. Misalnya di Sungai Watudakon bekerja sama dengan TNI Polri dan Forkopimda serta kerja sama dengan Komunitas Kelompok Pelindung Hutan (KEPUH).



Sumber foto: Dokumentasi DLH Jombang

Pelibatan Seluruh Elemen Masyarakat

Menurut Menis Agus Muttaqin selaku Sub Koordinator Pengendali Dampak Lingkungan) DLH Kab. Jombang, **kondisi sungai yang tercemar disebabkan oleh tiga hal:**

- 1** Jombang menjadi kawasan urban yang semakin padat penduduk
- 2** Tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mengelola limbah rumah tangga
- 3** Adanya industri yang berdiri di tengah perkotaan

Ketiga faktor ini memperparah kondisi sungai yang sebetulnya merupakan saluran sekunder sehingga ketika kemarau dan tidak ada air, sampah tetap dibuang ke sungai dan membuatnya kian tercemar.

Santri Jogo Kali menyadari bahwa masalah utama bukan hanya karena sampah tetapi perilaku masyarakat dan bisnis yang ada di sekitar sungai. Dalam pelaksanaan kegiatan, Santri Jogo Kali secara aktif berkolaborasi dengan lintas sektor, baik masyarakat, pelaku bisnis, hingga instansi pemerintah lainnya di Jombang.



Masalah ini kesimpulannya adalah karena perilaku masyarakat. Kita semua harus berubah. Akhirnya kita membuat program yang melibatkan masyarakat karena mereka adalah pelaku sekaligus korban.

— Menis Agus Muttaqin

Lebih dari Sekadar Bersih Sungai

Setelah mengidentifikasi akar dari permasalahan, Santri Jogo Kali mencoba merumuskan solusi yang tepat untuk mengubah perilaku masyarakat dan bisnis setempat yang turut andil dalam mencemari sungai. Dengan memegang teguh prinsip memanusiakan warga, Santri Jogo Kali menyadari bahwa untuk mengatasi permasalahan sampai akarnya, perlu dilakukan pendekatan secara bertahap antara lain:



Sumber foto: Dokumentasi DLH Jombang

1

Edukasi dan Sosialisasi

Pendekatan ini dilakukan melalui dua cara yakni pemasangan banner serta sosialisasi secara *door to door* kepada warga di bantaran sungai. Saat pelaksanaan kegiatan bersih sungai, beberapa anggota Santri Jogo Kali ditugaskan untuk mengajak warga setempat untuk ikut membersihkan sungai. Prinsipnya adalah Tut Wuri Handayani yakni memberi contoh terlebih dahulu agar

warga terdorong untuk berpartisipasi. Cara ini juga bertujuan untuk menciptakan kedekatan antara pemerintah dengan warga sekitar sehingga tumbuh rasa percaya pada satu sama lain.



Sumber foto: Dokumentasi DLH Jombang

2

Pembuatan Taman Bantaran

Jika pemasangan banner peringatan tidak mempan, pembuatan taman di sekitar bantaran menjadi solusi. Hal ini untuk menciptakan kesan “segar” membuang sampah di lokasi yang sudah ditanami tanaman bunga.



Sumber foto: jombangkab.go.id

3

Penyediaan Tempat Sampah

Untuk menghentikan kebiasaan warga dalam membuang sampah di sungai, Santri Jogo Kali mulanya mengimbau warga membuang sampah di bantaran sungai. Setelah terbentuk kebiasaan baru, peraturan dinaikkan menjadi membuang sampah di tempat sampah yang disediakan di dekat perumahan warga. Tempat sampah ini hanya boleh digunakan

untuk warga sekitar bantaran sungai saja. Apabila ada orang luar yang membuang sampah di tempat sampah tersebut, warga diminta menegur yang bersangkutan atau melapor ke DLH.



Sumber foto: DLH Jombang

4

Strategi “Sanggung” Sampah

“Sanggung” adalah patroli yang dilakukan oleh Santri Jogo Kali dengan menempatkan tim di sekitar area sungai pada titik-titik rawan pembuangan sampah dan pada jam-jam tertentu. Tugasnya untuk menegur apabila masih terjadi pelanggaran peraturan dengan menunjukkan bukti berupa video saat peristiwa berlangsung serta menunjukkan tempat pembuangan sampah terdekat. Dari aktivitas ini, sudah ada 43 orang yang tertangkap tangan.



Sumber foto: DLH Jombang

5

Penegakan Hukum

Warga yang tertangkap tangan saat membuang sampah sembarangan akan diberikan sanksi berupa pembinaan intensif dan siluet wajahnya akan dipasang di *banner* peringatan. Hal ini sebagai bentuk sanksi sosial yang tidak memermalukan namun tetap memberikan efek jera. Sanksi ini diterapkan dengan bekerja sama dengan Satpol PP selaku yang berwenang dalam menegakkan peraturan daerah.

Sementara bagi industri yang melanggar peraturan, DLH Jombang menerapkan sanksi administrasi berupa teguran yang harus dipatuhi. Apabila masih melanggar, sanksi dapat dinaikkan hingga pada tahap penutupan. Namun sampai saat ini perusahaan yang mendapat teguran langsung mematuhi aturan dan bahkan ikut mengirimkan perwakilan untuk mengikuti kegiatan bersih sungai.

Dampak Positif Santri Jogo Kali

Berkat kerja sama lintas sektoral, Santri Jogo Kali berhasil memberikan dampak positif khususnya di lingkungan sungai dan bantarannya. Beberapa perbaikan yang terlihat setelah adanya Santri Jogo Kali antara lain:



Perubahan perilaku warga bantaran yang mulai peduli akan kebersihan sungai. Warga justru ikut andil menjadi pengawas yang melaporkan jika terjadi pelanggaran;



Meskipun tidak ada data empirisnya, **muatan sampah** yang diangkut oleh truk **terpantau berkurang drastis**;



Mendapat beberapa penghargaan seperti Juara 4 pada kompetisi Kelompok Budaya Kerja (KBK) di tingkat Provinsi Jawa Timur, dua kali memenangkan Kompetisi inovasi publik (Kovablik) Jawa Timur di tahun 2016 dan 2017, serta penghargaan dari Kementerian PUPR berkat aktivitas bersih sungai;



Berhasil mendapat perhatian dari Bupati Jombang yang akhirnya mengarah pada **pencanangan program prioritas bernama Kali Resik** (sungai bersih) di tahun 2020.



Sumber foto: DLH Jombang

Lesson Learned dari Santri Jogo Kali

- 1 Santri Jogo Kali **berhasil mempertemukan pemerintah, komunitas, dan pelaku bisnis** untuk berkolaborasi dalam rangka mencapai tujuan yang sama yakni sungai Jombang yang bebas sampah;
- 2 Program Santri Jogo Kali dapat dinyatakan berhasil karena beberapa faktor:
 - ✓ **Adanya kolaborasi antar lini pemerintah selama pelaksanaan kegiatan.** Contohnya kerja sama dengan Dinas PUPR ketika membutuhkan alat pengeruk sampah serta kerja sama dengan pemerintah desa yang sungainya melewati area desa bersangkutan;
 - ✓ **Adanya hubungan berkelanjutan antara pemerintah dengan komunitas melalui pelebagaan Santri Jogo Kali** di bawah bendera DLH Jombang. Hal ini penting agar kegiatan pelestarian lingkungan dapat berjalan secara efektif dengan jangka waktu yang lama;
 - ✓ **Pihak yang berwenang terjun langsung dalam penanganan masalah** terbukti dengan adanya pengurus harian di Santri Jogo Kali yang terdiri dari representasi pemerintah serta perwakilan komunitas;
 - ✓ **Pemerintah memberi contoh melalui aksi nyata tidak hanya imbauan maupun sanksi belaka.** Salah satunya dengan menekankan prinsip “Tut Wuri Handayani” serta menempatkan pemerintah sebagai sosok “Bapak” yang mengayomi anaknya (masyarakat);
 - ✓ **Meningkatnya kepedulian dan kesadaran warga** dalam menjaga kebersihan sungai serta berperan aktif mengingatkan, mengawasi, dan melaporkan tindak pelanggaran yang terjadi;
 - ✓ **Adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah setelah adanya kegiatan** terbukti dari adanya pencaanangan program prioritas bupati Jombang Kali Resik di tahun 2020.
- 3 **Keberadaan Santri Jogo Kali menjadi contoh sukses partisipasi warga dalam tata kelola lingkungan** yang dibarengi dengan pembagian wewenang dan kepemimpinan yang setara antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini penting untuk mendorong terbentuknya solusi inovatif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tantangan dan Kendala

Menurut Menis, tantangan besar dalam pelaksanaan program Santri Jogo Kali adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun berbagai strategi agar mampu memecahkan masalah dari hulu ke hilir. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi serta adaptasi penyelesaian masalah yang lebih efektif di masa mendatang.

Policy Brief

Keberhasilan Santri Jogo Kali dalam mengatasi masalah sampah di sungai di Kabupaten Jombang dapat diadopsi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Namun agar dapat berjalan efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1 Pemerintah perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat guna menyusun program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat;
- 2 Berkaca dari *best practice* di Australia dan Tiongkok, dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan dana dan pelembagaan komunitas secara formal menjadi penting untuk menjamin keberlangsungan program *government-community relations* di Indonesia;
- 3 Strategi yang bertahap diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat hingga akhirnya ikut berpartisipasi;
- 4 Pelaksanaan program perlu melibatkan lintas lembaga dan mengesampingkan ego sektoral demi tercapainya tujuan program.

Profil Penulis

Menis Agus Muttaqin

Menis adalah alumni Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan, Universitas Sriwijaya. Menis saat ini menjabat sebagai Sub Koordinator Pengendali Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam kesehariannya, Menis mengelola pelaksanaan program-program pelestarian lingkungan di Jombang salah satunya adalah Santri Jogo Kali.

Tri Utami Rosemarwati

Tri Utami (akrab disapa Ami) lulus dari Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada dan kini berkarir di Forbil Institute. Sebelumnya, Ami sempat bekerja sebagai humas di perusahaan BUMN yang memunculkan ketertarikannya dalam mengeksplor isu-isu yang berkaitan dengan strategi komunikasi, CSR, dan pemberdayaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Cavaye, Jim. (2002). Governance and Community Engagement - The Australian Experience. Dalam W.R. Lovan; M. Murray dan R. Shaffer (Eds.), *Participatory Governance: Planning, Conflict Mediation and Public Decision Making in Civil Society* (pp. 85-102). UK: Ashgate Publishing.
- Curtis, Allan & Lockwood, Michael. (2000). Landcare and Catchment Management in Australia: Lessons for State-Sponsored Community Participation, *Society & Natural Resources*, 13(1), 61-73. DOI: 10.1080/089419200279243
- Cutlip, Center, and Broom, (2001). *Effective Public Relations* (Eighth Edition), New Jersey: Prentice Hall.
- Gao, Xiang & Teets, Jessica. (2021). Civil society organizations in China: Navigating the local government for more inclusive environmental governance, *China Information*, 35(1), 46-66. DOI: 10.1177/0920203X20908118
- Wiwitan, Tresnadkk. (2008). Konsep "Corporate Social Responsibility" dalam Kegiatan "Community Relations". Mimbar: *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 24(2), 151-164. Bandung: Universitas Islam Bandung.



FORBIL
INSTITUTE
BILLING FOR THE FUTURE, NOW

ISBN 978-623-5455-03-7 (PDF)



9 786235 455037